



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti usulan perubahan program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026.

KESATU : Ketentuan angka 2 dan angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 82 TAHUN
2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

MATRIK PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

KETERANGAN:

WARNA ABU-ABU	TARGET PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL
WARNA HIJAU	TARGET PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Laut Sehat Bebas Sampah	1. Ketentuan umum; 2. Ruang lingkup; 3. Pengelolaan sampah di kawasan sungai, pesisir, pulau pulau kecil, pelabuhan, dan aktivitas laut; 4. Sistem informasi laut sehat bebas sampah; 5. Insentif dan disinsentif; 6. Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan (penilaian													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			neraca sampah dan kesehatan laut); 7. Pendanaan; dan 8. Penutup.													
2.	Keputusan Menteri	Adaptasi Perubahan Iklim	1. Perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim; 2. Pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim; dan 3. Pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim.													
3.	Keputusan Menteri	Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu Tahun 2026-2029	Penetapan Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu Tahun 2026-2029, meliputi: 1. Penyu tempayan, penyu bromo (<i>Caretta caretta</i>); 2. Penyu hijau (<i>Chelonia mydas</i>); 3. Penyu sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>); 4. Penyu lekang (<i>Lepidochelys olivacea</i>); 5. Penyu pipih (<i>Natator depressus</i>); dan 6. Penyu belimbing (<i>Dermochelys coriacea</i>).													
4.	Keputusan Menteri	Harga Patokan Pengembangan Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut	Penetapan harga patokan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
5.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi	1. Penetapan kategori kawasan; dan 2. Penetapan zona, batas koordinat dan peta.													
6.	Keputusan Menteri	Status Perlindungan Jenis Ikan	Penetapan jenis ikan yang terancam punah													

3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Penetapan/ Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan	Menetapkan/ meningkatkan kelas pelabuhan perikanan													
2.	Keputusan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan	Penetapan rencana pengelolaan perikanan													
3.	Keputusan Menteri	Kuota Penangkapan Ikan	Penetapan kuota penangkapan ikan													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO